

Sarekat Islam sebagai Kelanjutan Boedi Oetomo:H.O.S. Tjokroaminoto dan Awal Kebangkitan Nasional di Kota Surabaya, 1908 – 1912

Andi Achdian

Universitas Indonesia
angdhiri@gmail.com

Abstrak

Artikel ini menawarkan tinjauan tentang awal pergerakan nasional Indonesia di lingkungan perkotaan Surabaya dan membahas kaitan antara kemunculan awal kalangan terpelajar pribumi melalui Boedi Oetomo (BO) dengan perkembangan Sarekat Islam (SI) di kota itu. Dengan menelusuri kiprah H.O.S Tjokroaminoto sebagai pemimpin SI di Surabaya, tulisan ini menunjukkan bahwa alih-alih perkembangan terpisah, Sarekat Islam adalah *kelanjutan* dari pergerakan kalangan terpelajar pribumi yang sebelumnya telah aktif di dalam BO. Artikel ini menunjukkan bahwa Tjokroaminoto telah memainkan peran penting sebagai pemimpin pergerakan di kalangan terpelajar pribumi di Surabaya dan menjadi pemimpin BO di kota itu pada saat awal pembentukannya. Dengan demikian, tulisan ini menjadi upaya memberikan sumbangan kekosongan di dalam periode penting sejarah Indonesia modern.

Kata Kunci: Pergerakan Nasional, Sarekat Islam, Boedi Oetomo, Kota Surabaya

Pendahuluan

Raden Oemar Said Tjokroaminoto, atau kemudian dikenal sebagai H.O.S. Tjokroaminoto, adalah figur penting dalam catatan sejarah pergerakan nasional Indonesia. Karya Amelz yang terbit pada 1952 dapat dikatakan menjadi salah satu karya awal dari penulis Indonesia tentang sosok Tjokroaminoto. Uraianya menyampaikan kesaksian tokoh-tokoh penting politik Indonesia pada jilid pertama dan nilai-nilai keagamaan yang membentuk orientasi dan pandangan Tjokroaminoto di jilid kedua (Amelz, 1952). Penulis Indonesia lain adalah Anhar Gonggong yang menyampaikan kisah Tjokroaminoto dengan nada serupa dan terbit pada pertengahan 1980an (Gonggong, 1985).¹ Kedua penulis dalam uraiannya lebih menekankan aspek penting kepahlawanan dan keteladanan Tjokroaminoto dibanding sebuah analisis tentang kiprahnya dalam politik pergerakan. Di luar para penulis Indonesia, sosok Tjokroaminoto dan kiprahnya juga menjadi perhatian para penulis lainnya seperti A.P.A.Korver (1985), Takashi Shiraishi (1990) dan Ruth T. McVey (2006). Masing-masing karya menawarkan analisis historis terhadap sosok Tjokroaminoto dan peran pentingnya sebagai pemimpin SI dalam apa yang dikatakan Shiraishi sebagai periode “zaman bergerak”.

Baik uraian yang dibuat para penulis Indonesia dan pengamat luar, keseluruhannya masih menyisakan beberapa permasalahan. Amelz dan Gonggong yang menekankan sosok dan keteladanan Tjokroaminoto dari sudut pandang keagamaan menyebabkan kiprahnya hanya tampil dalam satu warna mewakili pergerakan politik Islam Hindia-Belanda. Sementara kajian Korver, Shiraishi dan McVey, masih terbatas pada gambaran Tjokroaminoto sebagai sosok yang tiba-tiba muncul mendominasi arah perkembangan SI sejak keterlibatannya dalam menyelesaikan masalah hukum pembekuan organisasi SI di Surakarta pada pertengahan 1912. Kemunculan Tjokroaminoto dalam uraian ini mengundang pertanyaan bagaimana mungkin “seorang pendatang baru” dalam dunia pergerakan mampu dalam waktu cepat bisa mengambil alih kepemimpinan SI? Shiraishi dalam uraiannya memberi jawaban tentang intervensi pemerintah kolonial yang meningkatkan prestise Tjokroaminoto dan pengaruhnya terhadap SI. Kiprah Tjokroaminoto sebagai “Satria dalam perlindungan pemerintah”, seperti menjadi serangan pribadi terhadap dirinya di antara aktivis pergerakan saat itu, menjelaskan hal ini. Namun, uraian yang disampaikannya belum menjadi jawaban memuaskan terhadap pertanyaan

¹ Orientasi ini dapat dilihat dalam karya sejenis seperti ditulis Anhar Gonggong tentang sosok pribadi Tjokroaminoto (Gonggong, 1985).

mengapa para pemimpin SI di Surakarta pada awal pembentukannya bersusah payah menghubungi Tjokroaminoto dan Tjokrosoedarmo? Apa yang menyebabkan kedua sosok itu penting bagi para pendiri SI di Surakarta sehingga mereka harus meminta bantuan mereka mengatasi persoalan legalitas SI setelah residen Surakarta membekukan organisasi itu menyusul gelombang kekerasan anti-Tionghoa di Surakarta saat itu.

Artikel ini menunjukkan bahwa faktor utama yang menjadi dasar permasalahan yang menciptakan “lubang pengetahuan” ini adalah terlewatnya periode waktu selama enam tahun sejak Tjokroaminoto mulai menetap di Surabaya pada 1906 sampai keterlibatannya dalam SI memasuki pertengahan 1912. Tulisan ini menyampaikan bahwa enam tahun pertama Tjokroaminoto mulai menetap di Surabaya menjadi periode krusial yang mengawali perkembangan karir politiknya sebagai tokoh penting pergerakan anti kolonial. Artikel ini dengan demikian mencoba mengungkapkan kiprah penting Tjokroaminoto sepanjang rentang waktu sejak ia mulai menetap di kota itu sebelum ia menjadi tokoh penting dalam pergerakan SI. Uraian terhadap kiprah Tjokroaminoto di kota Surabaya pada awal abad tersebut bukan saja memberikan gambaran menarik kiprah kalangan terpelajar di Surabaya pada awal abad ke-20 yang relatif terabaikan dalam studi sejarah Indonesia modern, tetapi juga memberi petunjuk penting tentang sebuah “jembatan” yang menghubungkan pergerakan kaum terpelajar pribumi di BO dengan pergerakan SI. Fenomena ini mewakili gambaran yang menunjukkan kelanjutan “tradisi pergerakan” di kalangan terpelajar pribumi sejak dekade pertama abad ke-20 sampai periode-periode berikutnya dalam sejarah pergerakan anti kolonial di kota Surabaya saat itu.

Surabaya Memasuki Abad ke-20

Bagian ini akan terlebih dahulu menguraikan perkembangan yang terjadi di kota Surabaya sebagai latar yang mempengaruhi perkembangan aktivitas kalangan terpelajar pribumi di kota tersebut. Memasuki awal abad ke-20, kota Surabaya muncul sebagai kota industri dan perdagangan penting di Hindia-Belanda dengan jumlah penduduk terbesar melampaui Batavia sebagai ibukota pemerintahan kolonial. Catatan H. Van Kol dalam kunjungannya ke Surabaya pada awal abad ke-20 memberi gambaran tentang betapa kota itu begitu maju. Ia menulis tentang keberadaan pabrik mesin uap, galangan kapal, gudang-gudang kopi, gula dan minyak, pabrik semen dan penggilingan kopi, selain kompleks industri berat, pabrik baja dan kimia di wilayah pelabuhan yang menjadi dasar perkembangan

kota. Ia juga menyebutkan bahwa saat itu Surabaya menjadi kota dengan jumlah penduduk terbesar di Hindia-Belanda (146.944 jiwa) mengalahkan Batavia (115.807 jiwa), Surakarta (109.405 jiwa), Semarang (89.286 jiwa) dan Yogyakarta (72.235 jiwa) (Van Kol, 1903).

Di luar catatan pandangan pertama Van Kol tentang kemajuan industri di kota Surabaya, arti penting kota itu dalam perekonomian kolonial juga ditunjukkan dalam kuantitas produksi gula dari wilayah sekitar Karesidenan Surabaya yang mencapai 4.031.850 pikul pada 1908. Jumlah ini jauh lebih besar dibanding gabungan produksi gula empat karesidenan di Jawa Tengah (masing-masing Surakarta, Jepara, Banyumas dan Kedu) yang mencapai 3.771.005 pikul dan Yogyakarta 1.771.487 pikul (Lorck, 1912: 72). Di luar produksi gula, Surabaya juga menjadi pusat perkembangan industri berat seperti ditunjukkan melalui perkembangan pabrik senjata dan galangan kapal di Marine Etablissement di Ujung, pelabuhan Tanjung Perak, pabrik kimia, serta bengkel industri yang menghasilkan mesin-mesin untuk diekspor ke wilayah-wilayah jajahan Eropa di Asia. Dalam kaitan ini, industri di kota Surabaya jauh melampaui perkembangan industri-industri di kota lain seperti Semarang dan Batavia, sehingga Surabaya tumbuh berkembang menjadi tandingan terhadap Batavia sebagai pusat pemerintahan. Di kota Surabaya ini pula asosiasi-asosiasi pengusaha gula seperti *Algemeene Suikersyndicaat (AS)* dan *Java Werkgever Bond (JWB)* muncul sebagai kekuatan oposisi utama terhadap para *ambtenaar* di Batavia sampai akhir kekuasaan kolonialisme Belanda, termasuk politik konservatif mereka dalam menghadapi gelombang kemunculan politik pergerakan.

Para penulis Belanda sendiri telah menggambarkan arti penting kota ini dalam kaitannya dengan perkembangan sosial, ekonomi, politik, dan budaya masyarakat kolonial di Hindia-Belanda. Moses van Geuns, redaktur *Soerabajasch Handelsblad*, sebuah surat kabar berhaluan liberal yang dianggap menjadi juru bicara pengusaha pabrik gula menulis dalam artikelnya bahwa “Di Batavia orang segera mendapatkan formalitas dan kekakuan para birokrat” dan “kesantunan serta kebersihan ala negeri induk”, di Surabaya yang ada adalah “kebebasan dan segala sesuatu yang berjalan di luar aturan” mewakili “watak kosmopolitan dan pikiran yang terbuka” (*Soerabaja Handelsblad*, 26 Maret 1907).² Kesan menarik lainnya juga disampaikan C.K. Elout, koresponden *Algemeene Handelsblad* di Hindia Belanda, tentang kota Surabaya pada awal abad itu. “Selama empat tahun

² Cukup menarik bahwa gambaran mentalitas yang sama dapat kita temukan dalam konsepsi *Arek Suroboyo* yang mewakili gambaran sebagai “orang yang suka merasa bebas dari kewajiban sosial dan kewajiban lainnya... *business like* dan pekerja keras” (Frederick, 1989: 8).

terakhir [di Hindia Belanda],” tulis Elout, “Saya memiliki kesan bahwa Surabaya berkembang semakin sibuk dan semakin sangat bersifat Eropa. Semangat Eropa yang hilang di Hindia saya temukan kembali di kota ini” (Elout, 1930: 157).

Tidak dapat disangkal, dari segi perkembangan penduduk kota Surabaya pada abad ke-20, sifat kosmopolitan itu ditunjukkan melalui heterogenitas penduduk yang tinggal di kota tersebut. Sensus tahun 1930 menyebutkan bahwa Surabaya menempati posisi kedua setelah Batavia dengan total 341.000 jiwa yang terdiri dari orang Eropa (7,6%), Pribumi (79,4%), Tionghoa (11,4%) dan golongan Timur Asing lainnya (1,6%). Di luar kelompok besar ini terdapat pula warga lainnya seperti Jerman, Inggris, Armenia, Jepang, dan lainnya yang membentuk kosmopolitanisme kota Surabaya.³ Purnawan Basundoro dalam studinya juga menunjukkan gambaran menarik bahwa sejak awal abad ke-20, kota itu telah menjadi pusat pertemuan dari beragam etnis seperti Ambon, Minahasa, dan kelompok etnis dari Sumatra yang mengisi pekerjaan birokrasi dan ketentaraan di dalam pemerintahan kolonial (Basundoro, 2012: 1-13).

Kehidupan kosmopolitan seperti ini telah menjadi landasan perkembangan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar yang mempersatukan kalangan etnis dan ras berbeda di kota itu. Selain penggunaannya di dalam lembaga birokrasi dan pendidikan, perkembangan kapitalisme cetak yang membentuk “masyarakat terbayangkan” melalui keberadaan pers Tionghoa seperti *Bintang Soerabaja* sejak akhir abad ke-19 dan *Pewarta Soerabaja* turut berperan dalam menumbuhkan budaya masyarakat perkotaan yang berbeda dengan kota-kota di pusat kerajaan Jawa seperti Surakarta dan Yogyakarta dengan perkembangan penduduk yang relatif homogen. Sebelum kalangan terpelajar pribumi menerbitkan sendiri surat kabar mereka, *Bintang Soerabaja* berperan penting sebagai sarana mengekspresikan pemikiran mereka tentang ide-ide kemajuan bagi masyarakat pribumi.

³ Howard Dick mencatat perubahan besar jumlah penduduk kota Batavia setelah dekade kedua abad ke-20 dengan perkembangan birokrasi pemerintahan dan ekspansi ekonomi ke luar pulau seperti perkebunan di Sumatera Timur. Dalam sensus tersebut, Batavia dihuni sekitar 533.000 jiwa (Dick, 2003: 125). Di luar kelompok besar tersebut, beberapa warga asing lainnya yang tinggal di Surabaya dan membentuk wajah kosmopolitan kota ditunjukkan melalui keberadaan warga Jerman yang menjadi populasi Eropa terbesar kedua (844 jiwa) setelah orang-orang Belanda, disusul Armenia (388 jiwa), Inggris (383 jiwa), Prancis (85 jiwa), Swiss (67 jiwa) dan beberapa warga Eropa lainnya. Di luar kategori Eropa, warga asing lainnya sebagai penghuni kota dengan jumlah cukup signifikan adalah Jepang (720 jiwa), Amerika Serikat (31 jiwa) dan Filipina (26 jiwa). Bersama mayoritas penduduk pribumi (265.872 jiwa); Tionghoa (38.797 jiwa); Arab dan Timur Asing lainnya (5.682 jiwa), mereka membentuk kehidupan kota di ujung timur Pulau Jawa (Von Faber, 1936: 35)

Burgerlijk Avondschoon (BAS) dan Kebangkitan Nasional

Satu institusi penting lainnya adalah lembaga pendidikan tingkat lanjut di Surabaya. Sejak 1870-an para pengusaha dan pemerintah lokal bekerja sama membangun sekolah pertukangan (*Ambachtschool*) bagi lulusan sekolah dasar kelas dua (*Tweede School*) dan sekolah kejuruan petang (*Burgerlijk Avondschoon*, BAS) yang mendidik tenaga trampil dalam tiga jurusan, yaitu teknik bangunan, mesin, dan elektronik. Awal pembentukan BAS dimulai pada 14 Agustus 1877 ketika guru-guru HBS di Surabaya membuka kursus petang hari menyiapkan tenaga trampil memenuhi kebutuhan tenaga kerja di dinas pengairan, kereta api, dan kantor telegraf (Von Faber, 1931: 273). Berbeda dengan lulusan *Ambachtschool* yang menjadi pekerja teknis, lulusan BAS setelah tiga tahun masa studinya mengisi lapisan pekerja tingkat menengah seperti pengawas, mandor, dan juru tulis di dinas-dinas pemerintah seperti pengairan, pekerjaan umum, dan jawatan kereta api.

Dalam kaitan ini, sekolah BAS yang berorientasi menghasilkan lulusan siap kerja merupakan model pendidikan yang mewakili gambaran khas perkembangan kota Surabaya sebagai kota industri dan perdagangan. Setelah lulus, karir umum bagi siswa adalah pekerjaan setingkat pengawas atau supervisor di pabrik-pabrik milik perusahaan swasta atau pekerjaan teknis di bidang pengairan dan kereta api di kantor pemerintahan.⁴ Memasuki awal abad ke-20, BAS telah berkembang menjadi sebuah lembaga pendidikan kejuruan yang terbagi menjadi dua jurusan teknis, masing-masing teknik mesin dan bangunan. Kenyataan bahwa pekerjaan yang tersedia bagi lulusan ini adalah jenis pekerjaan kasar yang sangat tidak diinginkan kalangan elite priayi saat itu, memberi petunjuk tentang latar belakang umum siswa yang berasal dari kalangan priayi rendah. Sebagian besar siswa juga berasal dari luar kota Surabaya yang menyebabkan mereka harus tinggal dengan kerabat atau

⁴ Keragaman ras di sekolah itu bagaimanapun tidak menjadikan hambatan interaksi diantara siswa yang berbeda latar belakang tersebut (*Algemeene Verslag*, 1890: 43-48). Studi Laloli tentang kehidupan sehari-hari siswa di sekolah itu memberikan petunjuk bahwa perbedaan ras tidak terlalu menjadi masalah bagi siswa BAS. Kajian Henk Laloli juga memberikan gambaran menarik yang membandingkan latar belakang pekerjaan orang tua dari siswa-siswa sekolah menengah atas dan kejuruan di Hindia-Belanda pada awal abad ke-20. Ia menunjukkan bahwa sebagian besar (54%) adalah pegawai pemerintah, yang disusul dengan pemilik usaha sendiri (28,4) dan pegawai di perusahaan swasta (17%). Studi ini juga menunjukkan bahwa pendapatan rata-rata orang tua siswa BAS sebagian besar (77%) berada di bawah f 700 per tahun, yang berbeda dengan pendapatan rata-rata siswa sekolah H.B.S dengan pendapatan rata-rata tahunan di atas f. 1.200. Pada 1912, sekolah itu ditutup dan berganti menjadi *Technische School* (Laloli, 1994:39).

menyewa rumah kos bersama di lingkungan perkampungan sekitar Plampitan, Genteng, dan Ketabang yang bukan wilayah elite.⁵

Di antara siswa BAS dari kalangan pribumi sendiri terdapat sebuah ironi terkait masa depan mereka. Meski para siswa lulusan sekolah ini memiliki keterampilan teknis dan kemampuan berbahasa Belanda yang lebih baik dibanding para priayi dengan jabatan tinggi di pemerintahan, tetapi latar belakang keluarga yang umumnya berasal dari kalangan priayi rendahan menjadi hambatan bagi siswa-siswa ini untuk mengharapkan kedudukan lebih tinggi dibanding sekadar pengawas di birokrasi kolonial. Bagaimanapun, siswa-siswa pribumi di BAS inilah yang akan memainkan peran penting dalam arus perkembangan kebangkitan nasional kaum pribumi Jawa pada awal abad ke-20. Kelak, lulusan-lulusan BAS pula yang menjadi jaring penghubung antara kalangan pergerakan dengan buruh-buruh industri di Surabaya. John Ingleson menyebut bahwa terkait dengan radikalisme yang tumbuh di lingkungan industri kota Surabaya, para manajer pabrik dan perusahaan pada akhirnya lebih memilih lulusan di luar lembaga itu dari kota-kota lainnya (Ingleson, 2013:91-109)

Dalam konteks dan suasana zaman seperti itulah Raden Omar Said Tjokroaminoto memulai kiprah pribadinya. Setelah lulus dari sekolah rendah, Tjokroaminoto melanjutkan pendidikannya di sekolah pamong praja (*Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaar*) di Magelang sebagai titik tolak penting sebelum memulai karir di dalam birokrasi kolonial. Sesuai dengan harapan orang tuanya, setelah lulus Tjokroaminoto bekerja sebagai juru tulis Patih di Ngawi. Namun, pekerjaan ini tidak lama ditekuninya. Tiga tahun kemudian, ia memutuskan berhenti dan memulai pekerjaan lain di lingkungan partikelir. Tjokroaminoto mulai menetap di Surabaya pada 1906 dan bekerja sebagai juru tulis di firma Inggris Kooy & Co. Sebuah laporan yang ditulis Asisten Residen Schippers tentang latar belakang Tjokroaminoto menyebutkan bahwa “ia meninggalkan pekerjaannya sebagai juru tulis di Kepatihan Kabupaten Ngawi dan fungsi resminya sebagai Wedana di distrik yang sama.” Inilah yang menyebabkan ia dipecat oleh Residen Madiun pada 25 September 1906 (L.J. Schippers, 1913: 280).

Nampaknya, tidak lama setelah menetap dan bekerja di Surabaya sekitar bulan Mei 1906 Tjokroaminoto telah mendaftar dan mengikuti pendidikan di BAS. Gambaran ini ditunjukkan melalui berita yang muncul di surat kabar *Soerabajasch Handelsblad* pada 4 Mei 1908, yang memberitakan kenaikan kelas

⁵ Sejak tahun 1900 sampai tahun 1912 jumlah siswa pribumi yang tercatat mengikuti pendidikan di sekolah itu mencapai 1.532 orang (30,8%) dengan murid-murid non-pribumi dari kalangan Eropa dan Indo-Eropa yang mencapai 4.941 (59,7%) serta siswa Tionghoa yang mencapai 470 siswa (9,%) (Laloli, *op.cit*: 56-73).

siswa-siswa BAS, nama Tjokroaminoto ikut tercantum sebagai siswa yang baru naik di tingkat akhir (tahun ketiga) di jurusan teknik mesin (*Soerabjasch Handelsblad*, 4 Mei 1908). Keputusan Tjokroaminoto mengambil studi di sekolah petang BAS dengan latar pendidikan yang setara di OSVIA cukup menarik. Nampaknya hal itu terkait dengan kenyataan bahwa sebagai lulusan OSVIA, ijazah yang dimilikinya tidak terlalu relevan untuk mendapatkan pekerjaan yang relatif baik di lingkungan industri kota Surabaya yang lebih menghargai keahlian teknis dibanding keterampilan dasar sebagai pegawai birokrasi pemerintahan. Gambaran menarik lainnya adalah saat Tjokroaminoto mulai mengikuti pendidikan BAS di Surabaya. Saat itu usianya telah mencapai 24 tahun, yang merupakan usia yang relatif tua dibanding rata-rata siswa BAS lainnya yang memulai pendidikan mereka pada usia 16 tahun dan lulus pada usia 19 (Verlag, 1893: 95). Dengan kematangan usia dan pendidikan sebelumnya, bukan suatu kebetulan bila kemudian Tjokroaminoto tampil sebagai pemimpin di lingkungan siswa BAS dan membawa rekan-rekannya dalam sebuah agenda politik baru mewakili semangat kalangan terpelajar muda di Surabaya.

Tabel 1. Daftar Siswa Sekolah Petang Surabaya dari kalangan Pribumi Pada Mei 1908

Jurusan & Tingkat Pendidikan	Nama Siswa Pribumi
Lulus Tahun Pertama Jurusan Teknik Bangunan (Bouwkundigde)	R.M. Aboesoekoer; O.J. Akoewan; M. Ali; Moerdanoe; Rachmat
Lulus Tahun Pertama Jurusan Teknik Mesin	R.M. Ismael; Moeliadi
Lulus Tahun Kedua Jurusan Teknik Bangunan	R.M. Abdul Hamil; R.M. Brahim; R.M. Iman; R.M. Marjono; R. Moestakim; R. Sabithah; R. Soerdjo; Mas Soedirdjo; R. Soedomo; R.M. Soembardjo; Mas Wachjoe
Lulus Tahun Kedua	R. Oemar Said; M.J.A. Manoehoeto; R. Oerip
Sumber: "Burgeravondschoel". <i>Soerabjasch Handelsblad</i> . 4 Mei 1908.	

Klub dan Politik

Satu perkembangan menarik lainnya sejak kedatangan Tjokroaminoto di Surabaya adalah pembentukan Panti Harsojo yang oleh pers Belanda disebut sebagai “klub atau soos pribumi”. Pengakuan klub tersebut sebagai badan hukum terbit dalam sebuah pengumuman kecil di surat kabar *Het Nieuws van den Dag* pada 28 April 1908, sebulan sebelum deklarasi BO di STOVIA. Meski akte pendirian resminya menyusul setahun kemudian, tetapi serangkaian aktivitas telah dilakukan pengurus klub tersebut. Surat kabar *Soerabajasch Handelsblad* mengabarkan sebuah kegiatan ceramah yang diselenggarakan pengurus klub pada 27 Agustus 1908 yang menampilkan Raden Tjokrosoedarmo sebagai sekretaris klub dan menyampaikan pembahasan tentang “Asal-usul kelahiran gamelan Jawa”. Dalam pemberitaan tersebut, disebutkan pula bahwa ceramah itu “cukup banyak dihadiri banyak pengunjung, termasuk orang-orang Eropa yang memberikan donasinya.” Gambaran menarik pemberitaan tersebut adalah sifat terbuka klub tanpa batasan rasial pengunjungnya. Posisi Tjokrosoedarmo sebagai sekretaris klub cukup menarik. Ia telah memulai karirnya sebagai juru tulis di firma hukum de Bruyn pada 1900. Lima tahun kemudian, karirnya meningkat menjadi *chef-notaris* (notaris kepala) di firma hukum Ter Kuile, Surabaya. Riwayat pekerjaan profesional terakhirnya adalah sebagai rekanan di firma hukum H.W. Hazenberg sampai masa pensiunnya pada 1940.

Sementara terkait posisi Tjokroaminoto, sampai periode penulisan artikel ini informasi yang cukup kuat tentang kedudukan Tjokroaminoto pada masa awal pembentukan klub tersebut masih belum dapat ditegaskan dengan pasti. Sejumlah surat-menyurat pejabat pemerintah di Surabaya menyebutkan serangkaian rapat-rapat yang dilakukan tokoh-tokoh SI di Surabaya di dalam klub tersebut.¹¹ Informasi tentang kedudukan Tjokroaminoto baru mulai terlihat kemudian saat pembentukan SI di Surabaya seperti disampaikan Korver yang menyebutkan sosoknya sebagai “ketua perkumpulan tersebut”. Sayangnya, informasi yang disampaikan Korver belum memberikan rujukan terhadap sumber yang kuat tentang posisi Tjokroaminoto dalam kepemimpinan klub. Bagaimanapun, beberapa kemungkinan keterkaitan Tjokroaminoto dengan klub tersebut dapat ditemukan dalam catatan kenangan putra ketiga Tjokroaminoto, Harsono Tjokroaminoto, yang menguraikan pengalaman masa kecilnya di Surabaya bersama sang ayah. Harsono banyak menyinggung soal betapa sibuk

¹¹ Lihat surat-menyurat para pejabat lokal di Surabaya terkait kegiatan SI tidak lama setelah rapat umum pertama SI yang berlangsung di *Stadstuin* (Taman Kota) Surabaya pada Februari 1913. (ANRI, 1975).

bapaknya berkegiatan di klub. Dua minggu sekali Tjokroaminoto terlibat dalam kegiatan rutin berlatih pertunjukan wayang orang yang menjadi salah satu kegiatan andalan di dalam klub tersebut (Soebagiyo, 1985:11).¹² Selain itu, indikasi tempat tinggal Tjokroaminoto di Paneleh di tempat sama yang menjadi lokasi awal Panti Harsojo memberi petunjuk tentang kemungkinan peran pentingnya dalam kepengurusan klub pada saat awal pembentukan klub tersebut.



Keterangan Gambar: Raden Tjokrosoedarmo berpose dengan istri dalam perayaan ulang tahun ke-72 dan acara pelepasan dirinya di kantor notaris H.W. Hazenberg di Surabaya setelah 40 tahun bekerja di tempat tersebut. Sumber: *Soerabajasch Handelsblad*, 07 Februari 1940.

¹² Amelz menyebutkan bahwa kegiatan Tjokroaminoto dalam memainkan kesenian wayang orang dalam kaitan ini telah berkembang sejak ia menempuh pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah. Dalam lingkungan bangsawan Jawa, kemampuan memainkan perangkat seni, baik musik atau pertunjukan adalah bagian penting menunjukkan posisi sosial dan pengenalan mereka terhadap kebudayaan yang membedakan dengan rakyat kebanyakan, seperti kemampuan para bangsawan Eropa untuk berdansa yang tidak bisa dilakukan kalangan rakyat biasa (Amelz, 1952).

Kemunculan klub Panti Harsojo memberi indikasi penting tentang sejauh mana aktivitas kalangan terpelajar di kota Surabaya saat itu dan pandangan-pandangan mereka tentang persoalan-persoalan yang muncul di lingkungan kota mereka tinggal dan kehidupan masyarakat pribumi di Hindia-Belanda pada umumnya. Pengurus dan anggota klub juga kerap tampil dalam rangkaian kegiatan yang dilangsungkan komunitas Eropa di Surabaya, misalnya pertunjukkan di klub Eropa seperti Concordia, gedung kesenian Schouwbourg, dan mengisi pertunjukkan seni dalam acara pasar malam tahunan (*Jaarmarkt*) di *Stadstuin* atau taman kota. Dalam dekade-dekade selanjutnya, klub itu menjadi simpul kegiatan warga pribumi di kota Surabaya melalui kegiatan diskusi, debat, dan pertunjukkan kebudayaan.

Di luar kegiatan seni dan budaya serta diskusi, salah satu aktivitas menarik dari klub tersebut pada awal pembentuknya adalah penggalangan sebuah petisi yang diorganisir pengurus Panti Harsojo terkait usulan pembangunan sekolah dasar bagi siswa pribumi di Surabaya. Petisi itu ditandatangani 110 warga pribumi Surabaya dan ditujukan kepada dewan kota untuk meminta dukungan terhadap rencana mereka membangun sebuah sekolah dasar bagi siswa-siswa pribumi. Petisi itu menyebutkan bahwa “Ada sekitar 50.000 warga pribumi di kota Surabaya yang mampu mengeluarkan 10 sen setiap bulan untuk pendidikan anak-anaknya.” Dengan jumlah itu, diperkirakan dalam setahun akan terkumpul sejumlah f 60.000 yang cukup untuk membangun dua gedung sekolah bagi siswa pribumi. Persoalannya adalah dana tersebut belum mencukupi kebutuhan operasional membayar gaji guru. Oleh karena itu para penandatangan petisi yang terdiri dari warga pribumi “berkedudukan tinggi” di pemerintahan dan “warga partikelir dengan gaji tinggi” menyampaikan permintaan dukungan pemerintah menyiapkan tenaga pengajar. “Semoga anggota dewan yang mulia berkenan membantu warganya dalam persoalan yang sangat penting ini,” demikian penutup petisi tersebut (*Soerabajasch Handelsblad*, 20 oktober 1908).

Peran pengurus Panti Harsojo dalam proses penggalangan dan penyerahan petisi kepada dewan mewakili gambaran menarik tentang peran klub dalam kehidupan politik dan intelektual di lingkungan kota Surabaya. Melalui petisi yang digalang klub itu, kalangan terpelajar tampil sebagai kelompok pembaharu dengan ide-ide kemajuan bagi sebuah kota. Studi Peter Clark tentang klub dan perkembangan sosial politik masyarakat Inggris abad ke-17 memberikan gambaran menarik tentang posisi klub yang menjadi wadah kelompok-kelompok sukarela di dalam masyarakat. Dalam perkembangannya, klub-klub itu menjelma sebagai suatu lembaga sosial yang “menyumbangkan integrasi politik dan

budaya” warga seiring proses industrialisasi yang menjadi kekuatan utama pembentukan kota-kota modern di Inggris sepanjang periode kajiannya (Clark, 2000:471). Dalam konteks perkembangan Surabaya sebagai kota kolonial saat itu, keberadaan Panti Harsojo mewakili keberadaan ruang publik yang mengintegrasikan kalangan terpelajar dengan persoalan-persoalan nyata masyarakat pribumi di lingkungan kota tempat mereka tinggal dan menautkannya dengan kepentingan yang lebih luas: politik kolonial Hindia-Belanda.¹⁵

Boedi Oetomo Cabang Surabaya

Gambaran yang lebih jelas tentang kiprah Tjokroaminoto adalah perannya sebagai pemimpin BO di kota Surabaya, terutama setelah kongres Yogyakarta pada Oktober 1908 yang disusul dengan pembentukan cabang-cabang BO di berbagai daerah. Di Surabaya sendiri inisiatif menggulirkan pembentukan BO dengan melibatkan kalangan priayi tinggi mulai dilakukan sejak awal November 1908. Dalam berita yang terbit pada 9 November 1908, surat kabar *Bataviasch Nieuwsblad* menyebutkan bahwa “Raden Oemar Said, ketua perkumpulan BO cabang Surabaya” menyampaikan ceramah tentang tujuan dan agenda kerja BO. Ceramah yang berlangsung di Paseban, kediaman Bupati Surabaya, dihadiri bupati dan para priayi di kota itu, termasuk para pegawai di jawatan kereta api negara (*Staatspoorwegen*) dan Dinas Pos dan Telegraf. Berita itu juga menyebutkan bahwa tiga hari setelah ceramah berlangsung, jumlah anggota yang telah mendaftar dalam perkumpulan tersebut mencapai 52 orang, dan pengurus perkumpulan mengharapkan bahwa dalam waktu dekat jumlah anggota akan terus bertambah (*Bataviaasch Nieuwsblad*. 9 November 1908).

Dalam kaitan ini, terdapat petunjuk bahwa sejak deklarasi awal di Batavia sampai kongres Yogyakarta, perkembangan BO di Surabaya masih terbatas di lingkungan siswa BAS dan belum mendapatkan dukungan para priayi dan pejabat tinggi dari kalangan pribumi. Tjokroaminoto dan siswa BAS nampaknya menyadari keterbatasan itu dan berupaya mendekati kalangan priayi untuk mendapatkan dukungan mereka. Namun hal ini bukan langkah yang mudah. Perbedaan antara kalangan muda di dalam lingkaran siswa BAS dan kalangan priayi dan pejabat pribumi menjadi hambatan utamanya.

Gambaran ini ditunjukkan dalam pemberitaan *Bataviasch Nieuwsblad* pada 23 November 1908. Berita itu menyebutkan bahwa jumlah anggota perkumpulan

¹⁵ Sebagai pembanding tentang aspek penting klub tersebut, di kota Surabaya terdapat juga klub lain seperti Taman Kemoeljaan yang merupakan klub bagi para saudagar pribumi dan Arab yang dipimpin Ali Soerati yang kemudian menjadi salah satu sosok penting dalam gerakan SI di Surabaya (Korver, 1985).

telah bertambah menjadi 120 anggota, tetapi pada saat sama muncul pula dorongan di kalangan priayi rendahan yang telah menjadi anggota BO untuk menata kembali organisasi tersebut. Hal ini terutama disebabkan oleh pandangan bupati dan patih Surabaya yang menyatakan bahwa perkembangan perkumpulan itu belum mengarah pada proses yang menguntungkan, terutama keberadaan kelompok-kelompok yang mungkin mengarahkan perkumpulan tersebut kepada “perkembangan yang tak diinginkan.” Pandangan skeptis dari bupati dan patih Surabaya dalam kaitan ini cukup beralasan. Sebulan sebelumnya, tanggal 17 Oktober 1908, *Soerabajash Handelsblad* memuat surat pembaca yang ditulis secara anonim dari seorang terpelajar pribumi yang menyampaikan pandangan kaum terpelajar dan sikap mereka terhadap kalangan priayi di Surabaya saat itu:

“Dalam waktu dekat warga Eropa akan memilih wakil-wakil mereka di dalam Dewan Kota. Sangat disayangkan bahwa sampai sekarang keberadaan wakil-wakil pribumi di dalam dewan itu tetap merupakan hasil pengangkatan langsung dari pemerintah.

Mengapa kami orang-orang pribumi, tetap tidak memiliki hak untuk turut serta memilih wakil-wakil dari kalangan sendiri?

Kami memiliki kemampuan menimbang tentang langkah terbaik mewakili kepentingan kami. Kami juga memiliki sejumlah orang pribumi dengan pengetahuan yang luas dan kemampuan berbicara dalam bahasa Belanda, paling tidak memahami apa yang disampaikan di dalam dewan.

Sekarang ini, anggota-anggota pribumi—yang hanya bisa berbicara bahasa Melayu—duduk di dewan tanpa memberi sumbangan apapun...

Mungkin sekarang sudah waktunya, bagi pemerintah untuk melakukan perubahan terhadap anggota-anggota yang dimaksud, dan membiarkan orang-orang pribumi di Surabaya, memilih wakilnya yang benar-benar dapat menyuarakan kepentingan penduduk,” (*Soerabajash Handelsblad*, 17 Oktober 1908).

Selain kritik yang ditujukan kepada pemerintah kolonial terhadap proses pemilihan wakil-wakil pribumi melalui proses pengangkatan yang tidak

demokratis, nada pernyataan di dalam surat pembaca tersebut menyampaikan kecaman pedas terhadap para anggota dewan dari kalangan pribumi saat itu. Selain Raden Tumenggung Pandji Tjokro Negoro (Bupati Surabaya) yang mendapat pendidikan Eropa dan menguasai bahasa Belanda, sosok-sosok lainnya dikenal sama sekali tidak mampu berbahasa Belanda seperti Mas Sastrowikromo (Patih Wedana Surabaya), Raden Djojotirto Ardjo (Pembantu Jaksa Kepala Pengadilan Negeri Surabaya), dan Mas Soemowidjojo (Kepala Penghulu Pengadilan Negeri Surabaya).¹⁹

Di luar kritik yang disampaikan, redaksi *Soerabajasch Handelsblad* membuat catatan menarik terhadap petisi tersebut. “Yang berbicara di sini bukan lagi sekadar orang desa biasa, tetapi orang-orang Jawa terdidik yang telah menikmati pendidikan [Barat],” tulis redaksi. “Mereka sekarang sadar bahwa untuk mencapai posisi lebih tinggi dari sekadar juru tulis, mandor, atau pekerja magang, pendidikan Eropa menjadi sangat penting untuk bisa dinikmati lebih banyak warga pribumi.” (*Het nieuws van den Dag*, 17 Oktober 1908) Catatan ini memberikan gambaran tentang kiprah kalangan terpelajar dan harapan-harapan mereka tentang kemajuan masyarakat pribumi di lingkungan kota Surabaya saat itu.

Bagaimanapun, kritik pedas dalam surat pembaca tersebut telah menjadi ganjalan bagi kalangan siswa BAS untuk mendapatkan dukungan dari kalangan priayi dan pejabat tinggi pribumi. Sikap kalangan terpelajar muda seperti itu telah menjadi alasan bagi para priayi dalam perkumpulan itu melakukan penataan ulang meredam perkembangan perkumpulan ke arah yang tidak diinginkan. Langkah itu terjadi pada 20 Desember 1908 dalam rapat umum yang bertujuan menetapkan pengurus kepengurusan baru Boedi Oetomo cabang Surabaya. Rapat itu dihadiri sekitar 300 yang terdiri dari kelompok siswa BAS, para pejabat tinggi Surabaya seperti Bupati, Residen dan Asisten Residen, serta perwakilan golongan Tionghoa dan Arab (*Soerabajasch Handelsblad*, 21 Desember 1908). Fakta bahwa para pejabat tinggi dari kalangan pribumi dan Eropa turut hadir dalam rapat umum itu menunjukkan sejauh mana arti

¹⁹Di luar pejabat pemerintah, terdapat satu orang lagi mewakili kelompok partikelir dari kalangan pribumi yang diwakili Kario Sentono, seorang pengusaha pemasok daging di Surabaya. Bagaimanapun, perannya di dalam dewan tidak seperti golongan partikelir dari warga Eropa yang berjarak dengan para pejabat pemerintah. Kario Sentono lebih sering tidak hadir dalam rapat-rapat anggota dewan dan selalu menyerahkan keputusan terkait suara dari wakil pribumi kepada para pejabat pemerintah. Fakta bahwa para pejabat pribumi memiliki ketergantungan terhadap atasan mereka orang-orang Eropa dalam setiap perbuatan dan tindak-tanduknya menjadikan kehadiran mereka tidak lain sekadar sebagai kepanjangan tangan pemerintah dalam urusan dewan dari sudut pandang wakil-wakil partikelir Eropa. Sebuah artikel berjudul “De Gemeente-Politiek” yang terbit di *De Preanger Bode*, menerbitkan kembali surat pembaca itu sebagai alasan bahwa jumlah kursi bagi perwakilan penduduk pribumi yang diangkat pemerintah lebih baik dihapuskan keberadaannya. Di luar golongan pribumi, perwakilan anggota dewan dari kalangan Timur Asing diwakili dua orang Tionghoa, masing-masing adalah Major Tionghoa Tan Sing Tian dan Kapten Tituler Tionghoa The Toan Ing. Satu kursi lagi diwakili Kapten Arab Sech Mohamat bin Abdullah Bopsaid. (*De Preanger Bode*, 7 Mei 1909).

pentingnya Tjokroaminoto yang masih menjabat sebagai ketua mewakili kelompok siswa BAS dalam tubuh BO menyampaikan pidato pembukaan. Ia menyampaikan tujuan BO sebagai organisasi yang dibentuk untuk memajukan kepentingan penduduk pribumi dan hasil yang diharapkan dari rapat umum adalah mendapatkan kepengurusan definitif yang mewakili organisasi BO di Surabaya. Bagaimanapun pidato tersebut menjadi momen terakhir Tjokroaminoto sebagai ketua organisasi itu.

Hasil pemilihan mengulang kembali pengalaman kongres Yogyakarta yang menyingkirkan kelompok terpelajar muda dari posisi penting dalam organisasi. Raden Pandji Tjokrodiprodjo, wedana kota Surabaya yang masih saudara kandung bupati, terpilih menjadi ketua mengalahkan Tjokroaminoto yang digeser menjadi wakil ketua. Namun, gambaran yang menarik dari proses pembentukan kepengurusan baru tersebut adalah munculnya kepengurusan ganda perkumpulan BO di luar jabatan ketua, masing-masing adalah kepengurusan perkumpulan di kalangan siswa BAS dan non-BAS (dari kalangan priayi). Kepengurusan organisasi mewakili kelompok BAS dijabat Raden Oerip sebagai sekretaris, Raden Mas Marjono sebagai bendahara, dan Raden Roeslan serta Raden Wahjoe sebagai komisaris. Semuanya adalah rekan-rekan pendukung Tjokroaminoto di sekolah BAS. Sementara pengurus non-BAS dijabat oleh Mas Ngabehi Prawirodinoto sebagai sekretaris, Mas Ngabehi Soerowidjojo sebagai bendahara, dan Raden Pandji Pratamengkoesoemo serta Raden Sadarsan sebagai komisaris. Sementara Asisten Residen Jasper dan Bupati Surabaya Raden Pandji Tjokronegoro duduk sebagai penasehat organisasi (*Soerabajasch Handelsblad*, 21 Desember 1908).

Pembentukan kepengurusan BO yang terpisah di antara kelompok BAS dan non-BAS memberikan sebuah petunjuk tentang gesekan yang cukup kuat di antara kalangan terpelajar muda yang tidak mau melebur begitu saja di bawah para priayi dan pejabat tinggi, dan pada sisi lain kelompok priayi tidak begitu saja dapat mengarahkan para siswa muda tersebut sehingga lahir dua kepengurusan berbeda di dalam satu kota yang sama. Masih harus dibuat kajian selanjutnya untuk melihat apakah pola yang sama dalam organisasi BO ini juga terjadi di kota-kota lain seperti Probolinggo dan Bogor yang turut menjadi bagian dalam pembentukan awal organisasi tersebut. Namun yang jelas, sejak rapat umum tersebut, Tjokroaminoto dan rekan-rekannya di BAS telah kehilangan posisi penting di dalam tubuh organisasi yang telah mereka kembangkan sejak awal di Surabaya. Penetapan kepengurusan definitif di bulan Desember 1908 pada

akhirnya bukan menjadi sebuah awal perkembangan organisasi tersebut, tetapi lebih menandai awal kemerosotannya.

Terlebih setelah kemunculan organisasi baru bernama Pangroeti Moelia dengan ketuanya Patih Surabaya, Mas Sastrowikromo, pada Maret 1909. Bukti bahwa organisasi itu sejak awal lebih mewakili posisi priayi tinggi di Surabaya ditunjukkan melalui besarnya biaya keanggotaan sebesar f 5 dan kontribusi bulanan sebesar f. 2,5 yang terbilang jumlah yang cukup besar bagi warga pribumi biasa (*Bataviasch Nieuwsblad*, 29 Maret 1909). Melalui pembentukan Pangroeti Moelia, gaung kematian Boedi Oetomo cabang Surabaya tinggal menunggu waktu. Kalangan terpelajar tetap mewakili BO Surabaya dalam kongres kedua Boedi Oetomo di Yogyakarta pada Oktober 1909 (Nagazumi, 1989:98). Tanpa kesungguhan dukungan kalangan priayi dan keterbatasan pendanaan organisasi, BO dari kalangan siswa BAS memudar. Bahkan setelah mendapatkan diploma BAS, Tjokroaminoto mulai bekerja di pabrik gula Rogojempi di pinggiran Surabaya yang jauh dari keramaian (Gonggong, *op.cit*). Ini kemudian menjadi pola yang marak terjadi di kalangan muda lainnya di BO. Sutomo dan Tjiptomangoenkoesoemo, misalnya, juga memilih menjalankan pekerjaan mereka setelah menyelesaikan pendidikan. Kelak, tatkala momen perkembangan politik baru mewabah dan api nasionalisme menyala lagi di seantero Hindia-Belanda, orang-orang tersebut datang lagi ke dunia pergerakan yang sempat mereka tinggalkan itu—sebuah dunia yang tetap membakar gairah mereka selama bertahun-tahun.

SI Surabaya

Tjokroaminoto dan rekannya Tjokrosoedarmo adalah dua sosok penting di lingkungan kalangan terpelajar pribumi yang telah berperan aktif dalam menggulirkan ide-ide kemajuan mewakili suara kalangan terpelajar di Surabaya. Keduanya memiliki sikap kritis terhadap tatanan feodal yang menempatkan para priayi sebagai pemimpin di kalangan masyarakat pribumi. Meski kiprah Tjokroaminoto dalam organisasi BO terbentur oleh sikap konservatif kalangan priayi tradisional di kota itu, tetapi keduanya mendapatkan kesempatan lain menggulirkan ide-ide kemajuan masyarakat pribumi dalam momen pembentukan SI. Pengalaman keduanya dalam dunia pergerakan nampaknya telah menjadi alasan kuat bagi para pengurus SI di Surakarta untuk meminta pertolongan mengatasi persoalan hukum yang dialami organisasi tersebut. Selanjutnya, pengalaman itu pula yang menjadikan mereka dengan cepat tampil sebagai pemimpin SI menggantikan para pemimpin sebelumnya di Surakarta.

Sikap anti-priayi pun terus melekat di antara keduanya. Setelah memimpin SI, baik Tjokroaminoto dan Tjokrosoedarmo meninggalkan gelar kepriayian mereka. Bahkan Tjokrosoedarmo telah menggulirkan sebuah inisiatif gerakan Djowo Dipo yang mempopulerkan penggunaan bahasa *ngoko* sebagai perlawanan terhadap para priayi yang senantiasa mengharapkan orang-orang yang lebih rendah statusnya menggunakan bahasa Jawa *kromo* ketika berbicara dengan mereka. Kiprah Tjokroaminoto sebagai pemimpin BO di Surabaya dan Tjokrosoedarmo sebagai pengurus Panti Harsojo sebelum tampil menjadi pemimpin SI menjadi hal penting yang menunjukkan bahwa perkembangan SI di Surabaya bukan sebuah proses kemunculan organisasi berbeda dengan sosok yang juga berbeda. Kemunculan SI dan perkembangannya di Surabaya dalam kaitan ini memberi petunjuk tentang *kelanjutan* kiprah kalangan terpelajar yang mendapatkan peluang lebih besar mewujudkan gagasan dan cita-citanya di dalam SI dibanding organisasi sebelumnya.

Pembentukan Sarekat Islam di Surakarta dan peristiwa kerusuhan anti-Tionghoa yang muncul di kota itu menjadi dasar terbentuknya sebuah jalinan antara H. Samanhoedi, Tjokroaminoto, dan Tjokrosoedarmo sebagai pengurus Klub Panti Harsojo; serta Hasan Ali Soerati, seorang pedagang keturunan Arab yang juga ketua Taman Manikem, sebuah klub pedagang Muslim di kampung Arab Surabaya. Baik Korver maupun Shiraishi telah menyebutkan jalinan hubungan ini tanpa menjelaskan mengapa perwakilan SI Surakarta dan Ali Soerati di Surabaya menghubungi Tjokroaminoto dan Tjokrosoedarmo dalam persoalan kasus hukum yang dihadapi SI Surakarta. Dengan hanya mengandalkan informasi tentang Tjokroaminoto sebagai pegawai di pabrik gula Rogojampi dan Tjokrosoedarmo sebagai seorang notaris, uraian tersebut menjadi sulit dipahami. Namun, dengan melihat peran Tjokroaminoto sebelumnya sebagai ketua Boedi Oetomo Surabaya dan Tjokrosoedarmo sebagai sekretaris Panti Harsojo seperti diuraikan dalam bab sebelumnya, alasan-alasan itu menjadi masuk akal.²⁶

Lebih dari sekadar sebuah kebetulan, jalinan hubungan tersebut mewakili pemahaman di antara masing-masing kelompok tentang aktivitas yang sudah dilakukan sebelumnya yang menjadikan pilihan menghubungi Tjokroaminoto dan Tjokrosoedarmo relevan. Di sisi lainnya, Tjokroaminoto yang sebelumnya tersingkir dari kepemimpinan Boedi Oetomo dan menghabiskan waktu beberapa tahun sebagai administratur pabrik gula di pinggiran kota yang sunyi,

²⁶ Seluruh uraian tentang kaitan perkembangan SI dan peran Tjokroaminoto serta rekannya Tjokrosoedarmo dapat dilihat dalam Shiraishi (1990) dan Korver (1985).

mendapatkan peluang baru dengan persoalan yang dialami SI Surakarta. SI menjadi organisasi yang memberinya peran penting yang jauh lebih besar dibanding upayanya mengembangkan BO pada masa awal menetap di Surabaya.

Tidak dapat disangkal, dengan identitas keagamaan dan ketiadaan informasi tentang kiprah awal dua pemimpin penting SI Surabaya, menyebabkan kemunculan SI sebagai sebuah fenomena baru yang berbeda tanpa kaitan apapun dengan BO. Namun, dengan melihat siapa saja yang terlibat dalam kepemimpinan organisasi tersebut di Surabaya, sebuah kelanjutan agenda-agenda politik lama dengan jelas muncul di dalam organisasi SI. Sebuah artikel yang ditulis Raden Achmad dalam *De Preanger Bode*, ketua SI Surabaya setelah Tjokroaminoto menjadi ketua Central Sarekat Islam (CSI) memberi petunjuk tentang ini:

“Banyak pengamat luar menyampaikan pandangannya tentang karakter perkumpulan Sarekat Islam, sementara orang-orang di dalam perkumpulan itu sendiri masih belum memberi penjelasan tentang arah yang ingin dicapai melalui organisasinya. Ada yang menyebut Sarekat Islam mewakili gejala kebangkitan nasional. Lainnya menyatakan semangat keagamaan, dan terakhir adalah perihal perjuangan ekonomi.

Perbedaan pandangan itu tidak mengherankan. Masalahnya SI tidak hanya sebuah perkumpulan yang mewakili satu kelompok saja dari kalangan muda terpelajar di dalam organisasi ini, tetapi juga orang-orang yang hidup dengan tradisi lama berabad-abad. Cara paling mudah adalah dengan melihat lebih lanjut keragaman anggotanya: kaum muda pribumi terpelajar, agamawan dan orang-orang kampung biasa. Ketiganya memang seperti berjalan terpisah dan sulit memahami satu sama lainnya, *sepanjang landasan yang memungkinkan kemajuan rakyat Jawa belum tercapai.*

Orang sudah cukup banyak memahami tujuan-tujuan kaum muda terpelajar (di dalam organisasi SI). Boedi Oetomo hadir sebagai ekspresi utama kelompok itu. Apa yang sebelumnya tidak bisa mereka lakukan melalui organisasi itu, sekarang dapat dilakukan melalui SI. Pembentukan koperasi, serangkaian kongres yang menyebarkan gagasan chauvinistik, dukungan pembentukan sekolah untuk perempuan, pembentukan dana kematian dan sejenisnya adalah cita-cita kalangan muda terpelajar (di dalam BO).” (*De Preanger Bode*. 29 Januari 1914).

Artikel Achmad berjudul “Het Wezen van der Sarekat Islam” yang ditulisnya dengan bahasa Belanda prosaik ini menjadi dokumen kunci yang memberi petunjuk tentang pergerakan SI yang ditinjau dari sudut pandang “orang dalam” pergerakan di Surabaya saat itu. Tulisan itu juga dapat dianggap sebagai bantahan terhadap pandangan “orang luar” yang telah menyebutkan SI sebagai organisasi yang mewakili semangat kemajuan di kalangan pedagang Muslim dan fenomena “ikut-ikutan” seperti disampaikan dalam ulasan dr. Radjiman dari sudut pandang psikologi massa (Radjiman, 1987:55-63). Di dalam artikel tersebut cukup jelas tergambar pandangan “orang dalam” seperti kalangan terpelajar di dalam SI memandang kiprah mereka sebagai kelanjutan dari cita-cita yang yang tidak bisa mereka wujudkan di dalam organisasi sebelumnya. Pengalaman yang ditunjukkan Tjokroaminoto dan Tjokrosoedarmo yang menjadi sosok penting dalam pergerakan awal di Surabaya melalui klub Panti Harsojo dan perkumpulan BO memberi gambaran kuat tentang ini. Dengan tidak adanya batasan golongan priayi di dalam SI, perkembangan SI Surabaya menjadi semakin cepat setelah mendapatkan pengakuan resmi pemerintah. Sejak awal pembentukan SI di Surabaya pada Mei 1912, jumlah anggota dilaporkan telah mencapai sekitar 3.000 orang sampai pertengahan November 1912 dan angka ini meningkat dua kali lipat memasuki awal tahun 1913 pada rapat umum SI di taman kota Surabaya yang mencapai sekitar 6.000 anggota, lebih besar dibanding gabungan semua cabang SI di Jawa Timur (*Bataviasch Nieuwsblad*, 18 November 1912).

Penutup

Dengan melihat periode awal perkembangan pergerakan nasional Indonesia dari lingkungan kota Surabaya, sebuah gambaran menarik muncul mengatasi kekosongan di dalam karya-karya sebelumnya tentang peran penting Tjokroaminoto sebagai pemimpin SI pada masa-masa awal aktivitasnya. Apabila dalam kajian-kajian sebelumnya Surabaya relatif terabaikan dan terkesan tidak memiliki kedudukan penting di dalam periode awal tersebut, maka peristiwa-peristiwa yang terjadi di kota itu sejak Tjokroaminoto dan siswa-siswa sekolah BAS aktif menggulirkan pembentukan BO dan juga aktivitas yang dilakukan kalangan terpelajar di klub Panti Harsojo yang telah terbentuk lebih awal sebelum deklarasi BO, menjadi petunjuk penting yang menempatkan Surabaya sebagai bagian penting dalam perkembangan sejarah Indonesia modern.

Peran penting Tjokroaminoto di dalam BO sekaligus menjadi pembanding dari historiografi yang berkembang tentang sosok Tjokroaminoto dalam sejarah

Indonesia modern. Uraian tentang sosok Tjokroaminoto yang hanya menampilkan kiprahnya sebagai pemimpin SI dan nilai-nilai keagamaan yang membentuk watak pribadinya hanya mewakili satu perkembangan dalam pengalaman kehidupannya yang kaya. Ia bukan hanya pemimpin penting SI, tetapi juga menjadi bagian dari pergerakan kalangan terpelajar pada awal abad ke-20 dalam menyuarakan cita-cita kemajuan masyarakat pribumi. Artikel ini juga sekaligus melengkapi kekosongan dalam karya-karya lainnya seperti Takashi Shiraishi dan Ruth T. McVey yang tidak memiliki uraian tentang latar belakang Tjokroaminoto, sehingga ia seolah-olah tampil begitu saja sebagai tokoh penting yang kemudian memainkan peran utama sebagai pemimpin SI.

DAFTAR PUSTAKA

Surat kabar

Bataviaasch Nieuwsblad
De Preanger Bode
Het nieuws van den Dag
Soerabajasch Handelsblad

Dokumen Resmi

Arsip Nasional Republik Indonesia. *Sarekat Islam Lokal*. ANRI, Jakarta. 1975.
Algemeene Verslag van den Staat van het Middelbare en Lager Onderwijs. Batavia Drukkerij, Batavia. 1890.
L.J. Schippers kepada Residen Surabaya. *Geheim Voor Dienst. Bescheiden betreffende Vereeniging Sarekat Islam*. Batavia Landsdrukkerij, 1913.
Verslag Omtrent het Middelbare en lager onderwijs over 1892. Batavia Landsdrukkerij, 1893.

Buku dan Artikel

Amelz. *H.O.S. Tjokroaminoto hidup dan perjuangannya*. 2 Jilid. Bulan Bintang, Jakarta. 1952.
Achmad, Raden. "Het Wezen van der Sarekat Islam". *De Preanger Bode*. 29 Januari 1914.
Basundoro, Purnawan "Penduduk dan Hubungan Antar Etnis di kota Surabaya Pada Masa Kolonial". *Paramita* Vol. 22 No. 1 - Januari 2012.
Clark Peter. *British Clubs and Societies, 1580-1800. The origins of Associational World*. Clarendon Press, Oxford. 2000. Hal. 471.
Elout, C.K. *De Grootte Oost. Reisbrieven van C.K. Elout*. N.V. Boekhandel, Den Haag. 1930.
Faber, G.H.Von. *Nieuwe Soerabaja*. NV Boekhandel en Drukkerij van Ingen, Surabaya. 1936.
_____. *Oude Soerabaja*. NV Boekhandel en Drukkerij van Ingen, Surabaya. 1936.

- Frederick, William. *Pandangan dan Gejolak: Masyarakat Kota dan Lahirnya Revolusi Indonesia (Surabaya 1926-1946)*. Gramedia, Jakarta. 1989.
- Geuns, M van “Groei Batavia?”. *Soerabaja Handelsblad*, 26 April 1907.
- Gonggong, Anhar. *HOS. Tjokroaminoto*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, Jakarta. 1985.
- Ingleson, John. *Perkotaan, Masalah Sosial dan Perburuhan di Jawa Masa Kolonial*. Komunitas Bambu, Depok. 2013.
- Kol, H.H. van. “Uit Onze Kolonie,” *Soerabajasch Handelsblad*, 24 December 1903.
- Korver, A.P.E. *Sarekat Islam: Gerakan Ratu Adil?* Grafiti Pers, Jakarta. 1982.
- Laloli, Henk. *Technisch onderwijs en social-ekonomische veranderingen in Nederlands-Indie en Indonesië, 1900-1958*. Skriptie Universiteit van Amsterdam. 1994. Hal. 39
- Lorck, W. (eds). *Isles of the East. An Illustrated Guide*. Edward Lee & Co, Sydney. 1912.
- Mc. Vey, Ruth. T. *The Rise of Indonesian Communism*. Equinox Publishing, Jakarta. 2006.
- Nagazumi, Akira. *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia. Budi Utomo, 1908-1918*. PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta. 1989. Hal. 98.
- Radjiman. “A Study of the Sarekat Islam”. *Studies on Islam*. Occasional Paper No. 22. Centre for Southeast Asian Studies. James Cook. University of North Queensland. Australia. 1987.
- Shiraishi, Takashi. *An Age in Motion. Popular Radicalism in Java, 1912-1926*. Cornell University Press, Ithaca. 1990.
- Soebagijo. I.N., *Harsono Tjokroaminoto: Mengikuti Jejak Perjuangan Sang Ayah*. PT Gunung Agung, Jakarta. 1985.